Tak Mau Tergantung Tambang, Kalsel Pacu Pariwisata Jadi Sumber PAD Utama

(Dok : Kemenparekraf)

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bertekad mengalihkan sumber pendapatan daerah (PAD), utamanya dari sektor pertambangan ke pariwisata.

Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan mengungkapkan, pariwisata telah diposisikan sebagai program prioritas Provinsi Kalsel 2016-2021. Pihaknya ingin mendorong Kalsel agar bisa menjadi destinasi pariwisata nasional.

"Pariwisata harus dikembangkan potensinya karena bisa jadi andalan untuk menggantikan tambang. Kami bertekad ingin mengalihkan sumber ekonomi dari pertambangan ke pariwisata," ujarnya usai meluncurkan Calender of Event (CoE) dan Visit Kalsel 2020 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta, Senin (4/11/2019) siang.

Menurut dia, dalam komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel saat ini porsi sektor tambang masih tinggi yaitu sekitar 31%, sedangkan pariwisata kurang lebih 20%.

"Dulu pariwisata malah hanya 10%-an (dari PDRB). Target kami ke depan harus lebih lagi bahkan jadi dominan. Kalau bisa sampai 60%, jadi kita enggak tergantung lagi dengan tambang," ucapnya.

Rudy yang didampingi Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan (BPIK) Kemenparekraf, Ni Wayan Giri Adyani, pada kesempatan itu menjelaskan, Provinsi Kalsel ingin

menjadi destinasi wisata nasional dengan didukung oleh unsur 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas) yang memadai.

"Kalsel memiliki potensi wisata yang layak jual untuk mendatangkan wisatawan, diantaranya festival budaya dan seni yang mampu bersaing dengan daerah lain," katanya.

Ia menyebutkan, festival tersebut diantaranya Festival Pasar Terapung yang sudah berlangsung ratusan tahun, Festival Loksado, dan bambu rafting di Pegunungan Meratus sebagai Geopark Nasional.

Menurut Supiah, Ketua Komisi III DPRD Kalsel pada kesempatan yang sama, pertambangan hanya meninggalkan lubang dan merusak ekosistem alam. Namun dengan pariwisata, alam dan budaya bakal terus terjaga.

"Bulan Desember nanti, Presiden Jokowi juga akan meresmikan Bandara Internasional Syamsudin Noor yang statusnya jadi bandara internasional. Artinya, kita bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan dalam negeri dan turis mancanegara," sambungnya.

Deputi BPIK Kemenparekraf, Ni Wayan Giri Adyani menyatakan, tekad Kalsel yang ingin menjadikan pariwisata sebagai sumber ekonomi daerah (semula dari pertambangan) dinilai sangat tepat, karena hal itu sejalan dengan program pemerintah yang menetapkan pariwisata sebagai bisnis utama (core business).

"Provinsi Kalsel mempunyai banyak keunggulan di bidang pariwisata di antaranya daya tarik budaya dan alam," katanya.

Ni Wayan Giri Adyani mengatakan, pemerintah mengapresiasi peluncuran Calender of Event dan Visit Kalsel 2020 sebagai upaya mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan Nusantara (wisnus) ke Kalsel.

"Agar penyelenggaraan CoE dan Visit Kalsel 2020 berjalan sukses, maka harus mendapat dukungan semua stakeholder pariwisata serta melibatkan secara aktif masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan manfaatnya dengan meningkatnya ekonomi mereka," kata Ni Wayan Giri Adyani.

Ia menyatakan, event pariwisata sangat efektif untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, event tersebut harus dipilih kemudian diselenggarakan secara profesional dan spektakuler agar mendatangkan banyak wisman ke Indonesia.

Provinsi Kalsel, sepajang 2020 akan menggelar sebanyak 32 event pariwisata dengan dua event diantaranya yaitu Fest Triloksado (Festival Loksado) dan Festival Dayak Meratus masuk dalam kalander event nasional (National Calender of Event) 2020.

Provinsi Kalsel telah menetapkan top-5 wisata alam (nature), yaitu kawasan wisata Loksado, kawasan Tahura, Pulau Kaget, Ecotourism Samber Gelap, dan Kerbau Rawa Danau Panggan.

Selain itu, sebagai top-5 destinasi budaya dan kuliner adalah Pasar Terapung Lok Baintan, Pendulangan Intan Cempaka, Candi Agung Amuntai, Kelapayan, dan Desa Wisata Dayak Halong, sedangkan kuliner yang terkenal antara lain, Soto Banjar, Ketupat Kandangan, Paliat, Mie Bancir, dan Lontong Orari.

Untuk memeriahkan pelaksanaan Visit Kalsel Year 2020, telah dipersiapkan 5 festival tingkat nasional dan internasional antara lain Festival Bamboo Rafting, Festival Pasar Wadai, Festival Kemilau Banjarmasin, International Folks Festival, dan Festival/International Event. Untuk ini disiapkan di 3 lokasi sebagai tempat penyelenggaraan festival yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar.

Sebanyak 32 event pariwisata unggulan Kalsel yang digelar senjang tahun 2020 terbagai dalam 2 periode, yakni Januari hingga Juni 2020 akan digelar sebanyak 13 event antara lain Festival Karya Tari Serumpun Melayu Pesisir yang akan berlangsung di Kabupten Barito Kuala (10-14 Januari 2020) serta X-Treme Kiram, yang berlangsung di Kabupaten Banjar pada 6 Mei 2020.

Sumber Berita:

1. https://travel.detik.com/travel-news/d-4771291/lewat-pariwisata-kalimantan-selatan-melepaskan-diri-dari-tambang?_ga=2.247334983.298877848.1577751044-29691203.1564725410, 4 November 2019.
2. https://travel.kompas.com/read/2019/11/05/063000527/cita-cita-kalimantan-selatan--tak-tergantung-tambang-lirik-pariwisata, 5 November 2019.
3. https://ekbis.sindonews.com/read/1455453/34/tak-mau-tergantung-tambang-kalsel-pacu-pariwisata-jadi-sumber-pad-utama-1572862604, 4 November 2019..
4. https://www.suara.com/lifestyle/2019/11/05/095317/kalsel-alihkan-sumber-pendapatan-daerah-dari-sektor-pertambangan-ke-wisata, 5 November 2019.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi

berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing–masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkankan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembagalembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan,

teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.

- Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.